**Politik Luar Negeri Argentina**

**di bawah Pemerintahan Nestor Kirchner**

**dalam Sengketa Falkland (Malvinas)**

**Adinda Permata Ayuningtyas**

**070912039**

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

*Universitas Airlangga*

***Abstrak***

*Penelitian ini menelaah politik luar negeri Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Penelitian ini didasari pada perbedaan kebijakan yang diambil Argentina terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Dalam era pemerintahan Carlos Menem, Argentina memiliki sovereignty umbrella dengan Inggris yang berisi kesepakatan untuk tidak membawa isu Kepulauan Falkland (Malvinas) dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun ketika Nestor Kirchner menjabat sebagai presiden, Argentina mulai kembali mengangkat isu Kepulauan Falkland (Malvinas) dan mengabaikan sovereignty umbrella. Perbedaan politik luar negeri yang diambil Argentina merupakan permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengapa Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner memilih untuk melakukan pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori perubahan politik luar negeri dari Joakim Eidenfalk. Berdasarkan pendekatan teoritik yang digunakan, dapat dimunculkan argumentasi bahwa perubahan politik luar negeri Argentina disebabkan oleh faktor domestik yaitu birokrasi dan faktor eksternal yaitu organisasi regional OAS dan hubungan bilateral Argentina-Brazil. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung argumentasi bahwa adanya pengaruh dari birokrasi Argentina, OAS serta hubungan bilateral Argentina-Brazil.*

***Kata Kunci****: Politik Luar Negeri, Argentina, Nestor Kirchner, Kepulauan Falkland (Malvinas), OAS, Brazil*

*This research is about Argentina’s foreign policy under Nestor Kirchner’s administration on Falkland (Malvinas) dispute. Based on the differences policies which is taken by Argentina on Falkland (Malvinas) dispute. Under Carlos Menem’s administration, Argentina had an agreement with United Kingdom which is called sovereignty umbrella, this agreement was about a deal to not bring Falkland (Malvinas) case in their bilateral relations. Yet, under Nestor Kirchner’s administration, Argentina reclaimed the Falkland (Malvinas) islands and ignored sovereignty umbrella. Main focus in this research is about Argentina’s differences policies, why Argentina under Nestor Kirchner’s administration reclaimed the Falkland (Malvinas) islands. That case analyzed by using foreign policy changes theory by Joakim Eidenfalk. Based on theoretical approach, the thesis statement argue that the change of Argentina’s foreign policy are caused by domestic factor such as bureaucracy and external factor such as OAS regional organization and Argentine-Brazil bilateral relationship. Using literature and data analysis, the conclusions of this explanative research is there is an influence of Argentina’s bureaucracy, OAS and Argentine-Brazil bilateral relationship.*

***Keyword*** *: Foreign Policy, Argentina, Nestor Kirchner, Falkland (Malvinas) island, OAS, Brazil*

Kepulauan Falkland (Malvinas) merupakan Kepulauan yang terletak di Samudera Atlantik Selatan tepatnya 200 mil dari Argentina.

**Peta 1.1 Wilayah Kepulauan Falkland (Malvinas)**



Sumber : [www.defence.pk](http://www.defence.pk)

Kepulauan ini diklasifikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai *non-self governing territory* yang mana Kepulauan Falkland (Malvinas) bertanggung jawab atas semua bidang pemerintahan kecuali urusan luar negeri serta pertahanan yang berada dalam tanggung jawab pemerintah Inggris sebagai *self-governing overseas territory* Inggris ([www.falkland.info](http://www.falkland.info)).

Kedekatan geografis Kepulauan Falkland (Malvinas) dengan Argentina serta adanya persamaan sejarah yang sama-sama merupakan bekas jajahan Spanyol menjadikan Kepulauan ini diklaim menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Argentina. Upaya pengklaiman Argentina mengakibatkan terjadinya Perang Falkland pada 2 April 1982 ([www.militaryhistory.about.com](http://www.militaryhistory.about.com)). Perang Falkland (Malvinas) melibatkan Argentina sebagai negara yang mengklaim Kepulauan Falkland (Malvinas) sebagai wilayah teritorialnya dengan Inggris sebagai negara yang bertanggung jawab secara administratif di Kepulauan tersebut.

Paska terjadinya Perang Falkland (Malvinas) pada 1982, dinamika hubungan diplomatik Argentina dan Inggris dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) dapat dikategorikan ke dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tahun 1982—1989, tahap kedua pada tahun 1989—2003, dan tahap terakhir pada tahun 2003—2007. Pada tahap pertama, hubungan diplomatik Argentina dan Inggris sedang berada di level yang paling buruk dalam hubungan diplomatik bilateral suatu negara, yakni terjadinya pemutusan hubungan diplomatik atau pembekuan hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik ini ditandai dengan adanya penarikan duta besar kedua negara yang berlangsung selama 8 tahun hingga menjadikan pola perpolitikan luar negeri Argentina juga mengalami perubahan, terutama terkait dengan sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas).

Pada tahap kedua, 1989—2003, Argentina dan Inggris mengalami era perbaikan hubungan diplomatik pada pemerintahan Carlos Menem. Argentina dan Inggris mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1989, perwakilan kedua negara bertemu di Madrid, Spanyol untuk berunding dan membahas kembali hubungan diplomatik keduanya yang sempat terputus. Argentina dan Inggris kemudian sepakat untuk mengeluarkan pernyataan bersamatentang kerangkakedaulatan yang kemudian dikenal dengan *sovereignty umbrella* (Dodds, 2012 : 699)*. Sovereignty umbrella* merupakan kesepakatan antara Argentina dan Inggris untuk mengesampingkan isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) ketika kedua negara menjalin hubungan bilateralnya yang berisi :

 Perlindungan posisi kedua negara dalam isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas).

 Tidak ada tindakan di luar perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menegaskan posisi mereka dalam Kepulauan Falkland (Malvinas) (Palermo, 2011 : 4).

*Sovereignty umbrella* bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara Argentina dan Inggris tanpa membawa isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) (Doods, 2012 : 699).Hal terpenting di dalam *sovereignty umbrella* adalah Argentina tidak diperbolehkan menuntut Inggris untuk melakukan diskusi maupun negoisasi tentang kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) (Palermo, 2011 : 4). Selain menghasilkan *sovereignty umbrella,* kedua negara juga sepakat untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dengan menunjuk kembali duta besar, melanjutkan komunikasi udara dan maritim, menjalin kembali kemitraan dalam sektor ekonomi dan perdagangan serta tidak mengungkit isu perbatasan (Dodds, 2012 : 699). Kantor kedutaan di kedua negara pun dibuka kembali pada 26 Februari 1990. Inggris menunjuk Sir Humphrey Maud untuk menjadi duta besar di Argentina dan Argentina menunjuk Mario Campora untuk menjadi duta besar di Inggris (Dodds, 2012 : 699).

 Membaiknya hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris juga tercermin dari banyaknya kesepakatan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1989—2003, seperti terbentuknya South Atlantic Fisheries Commission(SAFC) pada 28 November 1990 ([www.falklands.info](http://www.falklands.info)). SAFC merupakan badan bentukan Argentina dan Inggris yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan stok ikan di kawasan Atlantik Selatan. Pada 27 September 1995 juga telah terjadi kesepakatan tentang perjanjian hidrokarbon antara pemerintah Argentina dan Inggris dengan menetapkan wilayah Barat Daya Atlantik sebagai wilayah kerjasama khusus dengan membentuk komisi bersama yang bertujuan untuk mendorong adanya eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon seperti minyak dan gas di kawasan Barat Daya Atlantik ([www.falklands.info](http://www.falklands.info)). Tidak hanya itu, pada 14 Juli 1999 pemerintah Argentina dan Inggris sepakat untuk membuka kembali layanan penerbangan dari kawasan Amerika Selatan ke Kepulauan Falkland (Malvinas) dan pemerintah Argentina juga menyetujui agar masyarakat Argentina bersedia menunjukkan paspor jika hendak memasuki wilayah Kepulauan Falkland (Malvinas).

 Pada tahap ketiga, hubungan diplomatik Argentina dan Inggris mulai menunjukkan tren yang negatif. Pemulihan hubungan diplomatik yang berhasil dibangun oleh Carlos Menem dengan berpegang pada *sovereignty umbrella* tidak bertahan lama karena pada 2003, Argentina yang berada di bawah kepemimpinan Néstor Kirchner menolak mempertahankan keberadaan *sovereignty umbrella* serta menginginkan Argentina dan Inggris untuk mendiskusikan kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.articel.janes.com](http://www.articel.janes.com)). Pada tahun 2003, Nestor Kirchner menghentikan ijin penerbangan menuju Kepulauan Falkland (Malvinas). Hal tersebut dilakukan untuk memunculkan kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) (Dodds, 2012 : 685). Nestor Kirchner juga terus mengangkat kembali isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) ke dalam forum-forum internasional seperti Organization of American States(OAS) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Dodds, 2012 : 685). Pemerintah Argentina juga merasa bahwa masalah kedaulatan Falkland tidak dapat teratasi hanya dengan menggalang dukungan dari forum-forum regional hingga internasional saja melainkan juga perlu ada upaya *co-option*. Upaya *co*-*option* ini dilakukan oleh Argentina dengan dua cara, *pertama* dengan mendapatkan resolusi yang mendukung Argentina untuk menuntut Inggris agar mau bernegosiasi kembali dengan Argentina terkait Kepulauan Falkland (Malvinas), *kedua* dengan tetap menggunakan forum internasional untuk menggalang dukungan bagi setiap tindakan yang dilakukan Argentina terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) (Dodds, 2012 : 685).

Politik luar negeri Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) bertolak belakang dengan politik luar negeri yang diambil oleh era kepemimpinan sebelumnya. Perbedaan politik luar negeri tersebut dikomentari oleh David McCann, seorang akademisi dari Universitas Ulster. Menurut McCann, perbedaan politik luar negeri yang diambil Argentina dikarenakan pada 2002 Argentina mengalami keruntuhan ekonomi sehingga ketika Nestor Kirchner terpilih sebagai presiden pada 2003, Kirchner memfokuskan pada program kebangkitan nasional dan ekonomi ([www.thejournal.ie](http://www.thejournal.ie)). Salah satu program kebangkitan nasional Kirchner adalah dengan memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Falkland (Malvinas) dengan melarang perusahaan-perusahaan tambang asing untuk beroperasi di Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.thejournal.ie](http://www.thejournal.ie)). Pada tahun 2007, Kirchner juga membatalkan secara sepihak perjanjian dengan Inggris untuk berbagi hasil dari minyak yang ditemukan di perairan Kepulauan Falkland (Malvinas). Pendapat yang berbeda diutarakan Federiko Merke seorang akademisi dari Universitas San Andres di Argentina, Merke melihat perbedaan politik luar negeri yang diambil oleh Argentina dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) disebabkan oleh munculnya dukungan regional oleh Organization of American States (OAS) serta dukungan dari negara-negara tetangga seperti Brazil dan Venezuala yang mendukung Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Menguatnya dukungan regional menjadikan pemerintah Argentina optimis bahwa pemerintah Inggris akan setuju untuk melakukan negosiasi ulang terkait masalah Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk)).

Kedua argumentasi di atas menjadi menarik dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan mengapa Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner memilih untuk melakukan pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) ?

**Pengaruh Birokrasi**

Lembaga legislatif (Kongres) adalah pembuat politik luar negeri Argentina, namun dalam pembuatan politik luar negeri Argentina, lembaga legislatif memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan lembaga legislatif Argentina menurut Spiller dan Tommasi adalah perputaran politik yang cepat di Kongres Argentina sehingga masing-masing legislator hanya memiliki kesempatan yang kecil untuk dapat terlibat di dalam perumusan kebijakan (Spiller dan Tommasi : 9). Legislator di Argentina dalam satu periode memiliki masa jabatan empat tahun dan setiap dua tahun sekali, setengah dari jumlah legislator akan dipilih kembali (Spiller dan Tommasi : 14). Adanya sistem pemilihan ulang dari setengah kursi legislatif di Argentina tidak dipergunakan dengan baik oleh para legislator karena tingkat pemilihan kembali legislator di Argentina sangat kecil hanya 20% *incumbent* yang kembali menduduki kursi legislator (Jones : 1). Seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1 Tabel Pemilihan Anggota Kongres di Beberapa Negara**



Sumber : Pablo T. Spiller dan Mariano Tommasi, “Argentina : Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes,” Stanford University Press : 37.

Tabel tersebut diatas menunjukan tingkat keinginan para legislator di Argentina untuk dipilih kembali hanya 26%, paling sedikit diantara negara lain dan prosentase kandidat yang terpilih kembali adalah 67% dengan total rata-rata legislator yang terpilih kembali hanya 17%. Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pemilihan kembali legislator di Argentina sangat rendah. Rendahnya tingkat pemilihan kembali legislator Argentina mengakibatkan Kongres tidak dapat berjalan secara efektif dalam merumuskan kebijakan. Ketidakefektifan Kongres dalam merumuskan kebijakan Argentina menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi sesuai dengan tinggi rendahnya perputaran politik di Argentina (Spiller dan Tommasi : 9). Tinggi rendahnya perputaran politik di Argentina dilakukan oleh aktor-aktor politik Argentina yang hanya bertahan di Kongres dalam kurun waktu yang sebentar (Spiller dan Tommasi : 9).

Rendahnya pemilihan kembali legislator di Argentina sebabkan karena para legislator yang terpilih bukanlah mereka yang ahli (Spiller dan Tommasi : 16). Spiller dan Tommasi mengungkapkan bahwa legislator di Argentina adalah legislator yang amatir sehingga keberadaannya di dalam Kongres hanya dijadikan sebagai karir mereka dan mereka kurang tertarik untuk merumuskan kebijakan (Spiller dan Tommasi : 19). Lemahnya konstitusi, hukum serta ketidakstabilan politik di Argentina juga mengakibatkan lembaga legislatif kurang mampu merumuskan kebijakan. Ketidakmampuan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan menjadikan birokrasi di Argentina mampu melakukan tindakan yang unilateral atau tindakan sepihak (Jones : 1). Tindakan sepihak yang dilakukan oleh birokrasi berdasarkan pada konstitusi Argentina serta adanya pemberian kekuasaan yang proaktif dari legislatif kepada lembaga eksekutif seperti Presiden (Spiller dan Tommasi : 28).

Kongres Argentina lemah dalam perumusan politik luar negeri disebabkan karena para legislator yang terpilih di dalam parlemen bukanlah orang-orang yang tepat, para legislator yang terpilih hanyalah orang-orang yang amatir sehingga keberadaannya di dalam Kongres hanya dijadikan sebagai karir mereka dan mereka kurang tertarik untuk merumuskan kebijakan selain itu rendahnya tingkat keinginan para legislator untuk menjabat kembali sangat tinggi yaitu 17%. Hal ini menjadikan lembaga legislatif Argentina tidak mampu merumuskan kebijakan. Lemahnya lembaga legislatif di Argentina menjadikan lembaga eksekutif di Argentina mampu melakukan tindakan yang unilateral atau tindakan sepihak untuk merumuskan politik luar negeri. Tindakan sepihak yang dilakukan eksekutif berdasarkan pada konstitusi Argentina serta adanya pemberian kekuasaan yang proaktif dari legislatif kepada presiden.

Lemahnya Kongres Argentina menjadikan birokrasinya berjalan dengan kuat, bentuk pengaruh dari birokrasi dalam perumusan kebijakan Argentina adalah dengan terbentuk The Malvinas Parliamentary Observatory Committee pada 2006 yang bertugas untuk membahas masalah kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) dan sebagai upaya Argentina untuk merebut kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) menjadi bagian dari kedaulatan Argentina. The Malvinas Parliamentary Observatory Committee terbentuk pada akhir Juni 2006 (Taylor dan Miller, 2007 : 29). Komite ini diketuai oleh Jorge Arguello seorang ketua komite luar negeri di Dewan Perwakilan Argentina. Komite ini memiliki empat belas anggota dewan, terdiri dari tujuh anggota Kongres yang mewakili berbagai partai politik serta tujuh akademisi bekerjasama dengan Dewan Kehormatan yang terdiri dari ahli sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) serta para mantan diplomat (Taylor dan Miller, 2007 : 29).

 Selang beberapa bulan terbentuk, pada awal Agustus 2006, Malvinas Parliamentary Observatory Committee mengeluarkan laporan pertamanya yang berjudul The Fallacy of Self-Determination. Laporan tersebut menyatakan bahwa Inggris tidak berhak melakukan pengklaiman atas Kepuluan Falkland (Malvinas) dan memutuskan kedaulatan untuk wilayah Kepulauan Falkland (Malvinas) (Taylor dan Miller, 2007 : 30). Komite tersebut meyakini bahwa tindakan sepihak Inggris tidak sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Tidak hanya dalam Kepulauan Falkland (Malvinas), komite juga menginginkan Inggris untuk menyelesaikan sengketa di Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich sesegera mungkin (Godoy, 2011 : 26). Komite juga menjunjung tinggi visi negara-negara di kawasan Amerika Selatan bahwa negara Amerika Selatan bebas dari penjajahan, dan kekuasaan Inggis di Kepulauan Falkland (Malvinas) serta perairan Atlantik Selatan adalah tindakan yang anakronisme dan harus segera dihentikan (Godoy, 2011 : 26).

Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Taiana dalam kesempatan ini mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai elit politis di dalam birokrasi Argentina dengan mendesak Kongres untuk membentuk komite khusus yang bertugas untuk membahas tentang sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Taiana juga mampu meredam masalah internal di dalam Kongres dan menjadikan Kongres Argentina bersatu padu untuk melakukan observasi ulang terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Selain Menteri Luar Negeri, Presiden Argentina Nestor Kirchner juga memberikan pengaruhnya terhadap politik luar negeri Argentina dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Nestor Kirchner telah mengeluarkan dekret 727/2006 yang berkenaan dengan pertahanan di Argentina. Dekret 727/2006 ini merupakan kebijakan pertahanan di Argentina yang menekankan bahwa Kepulauan Falkland (Malvinas), Georgias, dan Kepulauan Sandwich termasuk ke dalam wilayah maritim nasional Argentina. Dekret ini juga menunjukkan bahwa Argentina menginginkan adanya konsolidasi dari negara-negara tetangga untuk bersama-sama mengamankan wilayah teritori Amerika Selatan dengan melakukan aksi militer gabungan dengan bernaung di bawah National Defense Council (CODENA).

Dengan demikian, perumusan politik luar negeri tentang sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) merupakan prioritas penting dalam rancangan agenda kebijakan luar negeri Argentina (Romero, 2011 : 129). Sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) merupakan perhatian utama pemerintah Argentina tanpa melihat perbedaan partai yang ada di dalam birokrasinya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Argentina akan selalu cepat mengambil tindakan jika berkenaan dengan sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) (Romero, 2011 : 129). Karena pada dasarnya sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) adalah hal yang sangat sensitif dan memengaruhi rasa nasionalisme masyarakat Argentina sehingga pemerintah akan cepat mengambil kebijakan jika berkenaan dengan isu sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) (Romero, 2011 : 129).

**Pengaruh OAS**

Organization of American States (OAS) merupakan organisasi regional di benua Amerika yang terbentuk pada tahun 1948 di Kolombia ([www.oas.org](http://www.oas.org)). Organisasi regional ini berdiri untuk mencapai tujuan bersama negara-negara anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam OAS yang berisi tatanan untuk mengatur perdamaian dan keadilan, untuk mempromosikan solidaritas, memperkuat kolaborasi antarnegara anggota dan untuk mempertahankan kedaulatan, integritas territorial serta independensi mereka ([www.oas.org](http://www.oas.org)). Hingga saat ini tercatat ada 35 negara yang bergabung di dalam OAS yaitu; Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, Barbados, Trinidad dan Tobago, Jamaika, Grenada, Suriname, Dominika, Saint Lucia, Antigua dan Barbuda, Saint Vincent dan Grenadine, Kepulauan Bahamas, St. Kitts & Nevis, Kanada, Belize dan Guya ([www.oas.org](http://www.oas.org)).

Struktur tertinggi di dalam organisasi OAS adalah Majelis Umum (Allen : 51). Dalam proses pengambilan keputusan Majelis Umum OAS, Majelis Umum menganut sistem konsensus yang mana Majelis Umum menyediakan forum bagi para anggotanya untuk membuat keputusan atas kebijakan yang akan diambil oleh OAS ([www.international.gc.ca](http://www.international.gc.ca)). Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Piagam OAS yang menyebutkan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Umum harus disetujui oleh suara mayoritas atau 2/3 suara dari anggota OAS. Dengan demikian, masing-masing negara anggota memiliki satu suara atas kebijakan yang diambil OAS terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas).

 Dukungan yang diberikan OAS tertuang di dalam deklarasi OAS. Deklarasi tersebut dihasilkan oleh Majelis Umum OAS berdasarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OAS yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. KTT OAS merupakan pertemuan rutin para kepala negara anggota OAS yang mendiskusikan tentang isu-isu umum, penegasan kembali nilai-nilai bersama dan berkomitmen untuk melakukan tindakan yang kolektif dalam tingkat regional ([www.summit-americas.org](http://www.summit-americas.org)). Deklarasi yang dihasilkan dalam KTT OAS berisi berbagai macam pernyataan dan resolusi atas isu-isu regional dan salah satu hasil deklarasi tersebut adalah Declaration on The Question of The Malvinas Islandsyang berisi;

1. Mempertanyakan kembali tentang status dari Kepulauan Falkland (Malvinas).
2. Menerima keinginan pemerintah Argentina untuk terus melakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai dan melakukan pendekatan terhadap penduduk di Kepulauan Falkland (Malvinas).
3. Menegaskan bahwa Argentina dan Inggris perlu melakukan negosiasi ulang sesegera mungkin terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas).
4. OAS akan terus mengamati perkembangan sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) hingga mencapai penyelesaian yang pasti dan tuntas.

Deklarasi tersebut dikeluarkan oleh OAS setelah Majelis Umum OAS mendengar presentasi Argentina tentang Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.en.mercopress.com](http://www.en.mercopress.com)). Majelis Umum OAS menyambut baik keinginan Argentina untuk terus melakukan melakukan semua peluang yang memungkinkan untuk menuju penyelesaian sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) secara damai. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa OAS menginginkan Argentina-Inggris untuk melakukan negosiasi sesegera mungkin, negosiasi dilakukan dalam rangka mencari solusi yang damai terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Hal ini mengakibatkan OAS akan terus memantau perkembangan sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) untuk dibahas kembali pada KTT OAS berikutnya.

 Deklarasi OAS merupakan modal Argentina untuk memperoleh dukungan dari forum lain baik forum regional hingga forum internasional seperti PBB. Seperti yang penulis telah kemukakan sebelumnya, bahwa mendapatkan resolusi dari PBB merupakan salah satu upaya *co*-*option* merupakan salah satu upaya Argentina terkait pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Upaya *co*-*option* ini dilakukan oleh Argentina dengan dua cara, *pertama* dengan mendapatkan resolusi yang mendukung Argentina untuk menuntut Inggris agar mau bernegosiasi kembali dengan Argentina terkait Kepulauan Falkland (Malvinas), *kedua* dengan tetap menggunakan forum internasional untuk menggalang dukungan bagi setiap tindakan yang dilakukan Argentina terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) (Dodds, 2012 : 687). Dengan adanya deklarasi OAS menjadikan Argentina terus berjuang mendapatkan deklarasi PBB hingga pada 2004, salah satu badan PBB, yakni Komite Dekolonisasi mengeluarkan resolusi A/AC.109/2004/L.8 yang mempertanyakan Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.falkland.info](http://www.falkland.info)). Komite Dekolonisasi dapat mengeluarkan resolusi berdasarkan adanya permintaan dari pihak yang bersengketa untuk melakukan proses dialog demi dimulainya kembali negosiasi dengan tujuan untuk mencari solusi damai atas sengketa sesegera mungkin ([www.falkland.info](http://www.falkland.info)).

Adanya deklarasi yang dikeluarkan OAS setiap tahunnya, menunjukkan bahwa OAS mempertanyakan kembali tentang status Kepulauan Falkland (Malvinas) dan menegaskan bahwa OAS menginginkan adanya negosiasi ulang antara Argentina dan Inggris terkait kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas). Deklarasi OAS menunjukkan posisi OAS yang sejalan dengan politik luar negeri Argentina yang mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) dan menginginkan adanya negosiasi ulang dengan Inggris. Adanya deklarasi OAS yang sejalan dengan politik luar negeri Argentina memberikan keuntungan bagi Argentina. Argentina merasa bahwa pilihan untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) mendapatkan tanggapan positif dari OAS dan tanggapan positif tersebut menjadikan Argentina akan terus melakukan upaya pengklaiman hingga Inggris mau untuk bernegosiasi ulang dengannya.

Deklarasi OAS merupakan modal awal bagi Argentina untuk mencapai upaya *co-option ­*nya yakni mendapat resolusi dari PBB. Pada 2004, Komite Dekolonisasi PBB mengeluarkan resolusi A/AC.109/2004/L.8 yang menegaskan bahwa sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) harus diselesaikan secara damai dengan menganut prinsip-prinsip PBB yaitu non kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional. Komite Dekolonisasi PBB menginginkan Argentina dan Inggris untuk melakukan negosiasi ulang terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) hal ini sejalan dengan politik luar negeri Argentina untuk meminta Inggris melakukan negosiasi ulang mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas). Sehingga adanya dukungan dari OAS berupa deklarasi OAS mampu memengaruhi Argentina untuk mendapatkan resolusi dari Komite Dekolonisasi PBB.

**Pengaruh Hubungan Bilateral Argentina-Brazil**

Brazil merupakan salah satu negara yang sangat mendukung upaya Argentina atas klaim yang dilakukan terhadap Kepulauan Falkland (Malvinas) (Merke, 2012). Di bawah pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil selalu ingin menjadi pemimipin di Amerika Selatan, maka beliau melakukan kebijakan untuk menata kembali dan mengintegrasi kawasan Amerika Selatan di bawah kepemimpinan Brazil (Saraiva, 2012 : 13). Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Brazil, Celso Amorim

“The integration of South America is our principal priority. And it is not a priority of just this government or my own, but of the Ministry of External Relations (the Itamaraty) as a whole, based on global reality. South America must be our priority because the world is uniting in blocs, and the Americas have not yet formed a bloc. There is one superpower, other developing countries and even some very small and poor nations. But South America could be a bloc of nations, one that is not homogeneous, which has its own conflicts, but one that also has the possibility to form a great union with the ability to negotiate. This is why the entry of Venezuela into the Mercosur was so important. Mercosur is not only formed by South Cone countries and could become a bloc of nations representing countries from the Caribbean to Patagonia.”

Salah satu bentuk integrasi yang dilakukan Brazil di kawasan Amerika Selatan adalah dengan membentuk Dewan Pertahanan Amerika Selatan (Saraiva, 2012 : 13). Pembentukan Dewan Pertahanan Amerika Selatan ini bertujuan untuk memperat hubungan antara negara di kawasan Amerika Selatan terutama dalam bidang militer. Isu utama yang dihadapi oleh Dewan Pertahanan Amerika Selatan saat pertama kali terbentuk pada 2002 adalah isu kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) (Saraiva, 2012 : 13). Terbentuknya Dewan Pertahanan Amerika Selatan yang digagas oleh Brazil meruapkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan Brazil kepada Argentina dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Brazil sebagai negara besar di kawasan Amerika Selatan juga ingin menjaga integrasi kawasan. Keberadaan tentara-tentara Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) dianggap Brazil sebagai pengganggu stabilitas kawasan Amerika Selatan sehingga upaya Argentina untuk melakukan pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) akan didukung penuh oleh Brazil. Ketika Kepulauan Falkland (Malvinas) sudah berada di bawah pemerintahan Argentina maka tidak akan ada tentara Inggris di kawasan Amerika Selatan dan keinginan Brazil untuk menjaga stabilitas kawasan akan terwujud.

Pada 17 April 2007, Brazil dan Argentina serta negara-negara kawasan Amerika Selatan menandatangani Presidential Declaration on the Malvinas Islands yang berisikan komitmen para presiden negara kawasan Amerika Selatan untuk terus mendukung upaya Argentina mendapatkan hak-haknya atas Kepulauan Falkland (Malvinas) serta mendukung penuh keputusan Argentina untuk mendesak Inggris agar melakukan negosiasi ulang terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.mrecic.gov.ar](http://www.mrecic.gov.ar)). Tidak hanya itu, Presidential Declaration on the Malvinas Island juga menunjukkan keprihatinan Brazil atas kehadiran kekuatan ekstra-regional yang berupa penempatan pasukan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas), kehadiran para tentara Inggris tidak sesuatu dengan prinsip untuk menghormati kedaulatan serta integritas kawasan Amerika Selatan (Garre, 2011 : 38).

Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva adalah salah satu orang yang sangat mendukung upaya Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Semenjak tahun 2002 saat pemilihan Kirchner. Lula da Silva sudah mendukung agar Argentina mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) dan meminta Inggris untuk melakukan negosiasi ulang terkait kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas). Luiz Inacio Lula da Silva berbicara di akhir pertemuan negara-negara di kawasan Amerika Selatan *"Our attitude is one of solidarity with Argentina”* ([www.brazzilmag.com](http://www.brazzilmag.com)). Disamping itu Lula da Silva juga menambahkan

“What is the geographical, political and economic explanation for England to be in the Malvinas? What is the explanation for the United Nations never having that decision? It is not possible that Argentina is not the owner while England is, despite being 14,000 km away.”

Keberadaan Inggris sebagai salah satu Dewan Keamanan (DK) PBB juga disoroti oleh Luiz Inacio Lula da Silva, karena DK PBB mengindahkan klaim Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas). Lula juga menyatakan *"Is it possible that Britain can do everything and while others can do nothing? We need to start pushing so that the UN secretary reopen this debate*" ([www.brazzilmag.com](http://www.brazzilmag.com)). Brazil menganggap PBB mendukung upaya kolonisasi yang dilakukan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas). Brazil mendesak PBB untuk memfasilitasi pertemuan antara Argentina dan Inggris untuk melakukan negosiasi ulang terkait sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas). Upaya Brazil ini kemudian membuahkan hasil, didukung oleh adanya deklarasi KTT OAS yang menyatakan perlunya negosiasi ulang akan kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) antara Argentina-Brazil. Komite Dekolonisasi PBB mengeluarkan resolusi A/AC.109/2004/L.8 pada 2004 yang mempertanyakan status Kepulauan Falkland (Malvinas) ([www.falkland.info](http://www.falkland.info)).

Sebagai hasil dari adanya hubungan bilateral Argentina-Brazil yang terjalin baik mengakibatkan Brazil mendukung politik luar negeri Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Hubungan baik antara Argentina-Brazil juga disebabkan kedua negara memiliki aliansi perdagangan yakni MERCOSUR bersama dengan Paraguay, Uruguay serta Chili. Selain adanya aliansi perdagangan MERCOSUR, dukungan yang diberikan oleh Brazil terutama dalam masa pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva juga disebabkan oleh adanya persamaan latar belakang pemimpin kedua negara yakni berasal dari partai sayap kiri. Hal ini menjadikan hubungan bilateral antara kedua negara terajalin dengan baik. Brazil sebagai negara yang menginginkan adanya stabilitas dan keamanan kawasan Amerika Selatan akan selalu mendukung upaya Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) karena keberadaan tentara Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) dianggap sebagai suatu ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan Amerika Selatan. Hal ini mengakibatkan Brazil berupaya untuk meningkatkan pertahanan kawasan Amerika Selatan dengan membentuk Dewan Pertahanan Amerika Selatan. Dengan demikian Brazil terus mendukung agar upaya pengklaiman Argentina atas kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) direspon oleh PBB. Brazil juga melayangkan kritik kepada PBB karena PBB dianggap melegalkan upaya kolonisasi Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas). Posisi Inggris sebagai salah satu DK PBB dianggap menguntungkan bagi Inggris karena ia memiliki posisi yang lebih kuat di PBB dibandingkan dengan Argentina dan Inggris dirasa lebih mampu melakukan apa saja karena ia memiliki pengaruh yang lebih besar di PBB. Posisi Brazil yang secara politik tidak menginginkan keberadaan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) menjadikan Brazil memberikan pengaruh yang besar dalam kebijakan pengklaiman kembali Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas). Baik Brazil dan Argentina, berupaya menjaga kedekatan antara keduanya, persamaan latar belakang pemimpin, persamaan akan persepsi keberadaan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) merupakan keuntungan yang diperoleh Argentina terutama dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Sehingga upaya-upaya untuk mendekatkan hubungan baik kedua negara akan terus dilakukan Argentina seperti dengan mengeluarkan dekret pertahanan 727/2006 sebagai respon atas pembentukan Dewan Pertahanan Amerika Selatan yang dibentuk oleh Brazil.

 Dengan demikian, Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner memilih untuk melakukan pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) karena disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik berasal dari birokrasi Argentina melalui lembaga eksekutif mampu menekan Kongres untuk membentuk The Malvinas Parliamentary Observatory Committee pada 2006. Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Taiana juga mampu menunjukkan bahwa jika berkenaan dengan sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas), masalah internal di dalam Kongres dapat teratasi dan menjadikan Kongres Argentina bersama-sama berjuang untuk merebut kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) menjadi milik Argentina. Selain Perdana Menteri, Presiden Argentina Nestor Kirchner juga telah mengeluarkan dekret 727/2006 yang berkenaan dengan pertahanan di Argentina. Dekret 727/2006 ini merupakan kebijakan pertahanan di Argentina yang menekankan bahwa Kepulauan Falkland (Malvinas), Georgias, dan Kepulauan Sandwich termasuk ke dalam wilayah maritim nasional Argentina. Faktor eksternal berasal dari regionalisme dan hubungan bilateral. Faktor regionalisme yang digunakan adalah regional benua Amerika dengan OAS sebagai organisasi regionalnya. Adanya Deklarasi KTT OAS yang menyatakan bahwa OAS menginginkan adanya negosiasi antara Argentina dan Inggris terkait kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas). Deklarasi KTT OAS ini merupakan modal Argentina untuk memperoleh dukungan dari forum lain baik forum regional hingga forum internasional seperti PBB. Hingga pada 2004, salah satu badan PBB, yakni Komite Dekolonisasi mengeluarkan resolusi A/AC.109/2004/L.8 yang mempertanyakan kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Diperolehnya resolusi dari Komite Dekolonisasi PBB membuktikan bahwa upaya co-option Argentina berhasil dan upaya untuk mendapatkan resolusi dari Komite Dekolonisasi PBB tidak terlepas dari adanya Deklarasi KTT OAS yang mendukung Argentina untuk melakukan negosiasi ulang dengan Inggris.

Faktor hubungan bilateral yang digunakan adalah hubungan bilateral Argentina-Brazil. Hubungan bilateral Argentina-Brazil yang terjalin baik mengakibatkan Brazil mendukung politik luar negeri Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Hubungan baik antara Argentina-Brazil disebabkan karena kedua negara memiliki aliansi perdagangan yakni MERCOSUR bersama dengan Paraguay, Uruguay serta Chili. Selain adanya aliansi perdagangan MERCOSUR, dukungan yang diberikan oleh Brazil terutama dalam masa pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva juga disebabkan oleh adanya persamaan latar belakang pemimpin kedua negara yakni berasal dari partai sayap kiri. Hal ini menjadikan hubungan bilateral antara kedua negara terajalin dengan baik. Brazil sebagai negara yang menginginkan adanya stabilitas dan keamanan kawasan Amerika Selatan akan selalu mendukung upaya Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Falkland (Malvinas) karena keberadaan tentara Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) dianggap sebagai suatu ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan Amerika Selatan. Hal ini mengakibatkan Brazil berupaya untuk meningkatkan pertahanan kawasan Amerika Selatan dengan membentuk Dewan Pertahanan Amerika Selatan. Dengan demikian Brazil terus mendukung agar upaya pengklaiman Argentina atas kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) direspon oleh PBB. Brazil juga melayangkan kritik kepada PBB karena PBB dianggap melegalkan upaya kolonisasi Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas). Posisi Inggris sebagai salah satu DK PBB dianggap menguntungkan bagi Inggris karena ia memiliki posisi yang lebih kuat di PBB dibandingkan dengan Argentina dan Inggris dirasa lebih mampu melakukan apa saja karena ia memiliki pengaruh yang lebih besar di PBB. Posisi Brazil yang secara politik tidak menginginkan keberadaan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) menjadikan Brazil memberikan pengaruh yang besar dalam kebijakan pengklaiman kembali Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas). Baik Brazil dan Argentina, berupaya menjaga kedekatan antara keduanya, persamaan latar belakang pemimpin, persamaan akan persepsi keberadaan Inggris di Kepulauan Falkland (Malvinas) merupakan keuntungan yang diperoleh Argentina terutama dalam sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Sehingga upaya-upaya untuk mendekatkan hubungan baik kedua negara akan terus dilakukan Argentina seperti dengan mengeluarkan dekret pertahanan 727/2006 sebagai respon atas pembentukan Dewan Pertahanan Amerika Selatan yang dibentuk oleh Brazil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal Ilmiah**

Allen, Nick. “The Union of the South American Nations, The OAS and

Suramerica,”

Belt, Guillermo. “The Organization of American States : An Introduction,” (Juni, 2002) Washington

Bologna, Alfredo Bruno. “The situation of Malvinas Islands at the beginning of the Bicentennial of the Argentine Independence,” dalam *The Question of Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina*, 174 (Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory Committee Honorable House of Deputies of the Nation, 2011)

 Bouzas, et al. “Dilemas de la Política Comercial Externa Argentina,” Buenos Aires: Fundación OSDE / Universidad de San Andrés (2002) dalam Pablo T. Spiller dan Mariano Tommasi, “Argentina : Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes,” Stanford University Press

Brady, Linda P. dan Kegley, Jr Charles W. “Bureaucratic Determinants of Foreign

Policy: Some Empirical Evidence.” *International* *Interactions*, 3 (1977)

Carey, John M. “Presidential versus Parliamentary Government,” Handbook of

 New Institutional Economics, (Spinger, Belanda, 2005)

Dietrich, J.W. “Interest Groups and Foreign Policy: Clinton and the China MFN

 Debates.” (Presidential Studies Quarterly, v29, i2, Juni, 1999)

Dodds, Klaus. “Stormy waters: Britain, the Falkland Islands and UK

Argentine relations,” *International Affairs* 88: 4 (2012)

Eidenfalk, Joakim. “Towards a New Model of Foreign Policy Change.”(makalah

disampaikan dalam Australasian Political Studies Association Conference, Newcastle, 25-27 September, 2006)

Forero, Carlos Andres Palomeque. “Politica Exterior Estrategica Para Colombia,”

Pontificia Universidad Javeriana (2005)

Hofmeister, Wilhelm. “Brazil’s Approach to Regional Politics–Constructing a New CASA or Just Another Castle in the Air for South American Integration?,” [conference paper at GIGA (Germany Institute of Global and Area Studies)]

Garré, Nilda. “The Question of Malvinas from the National Defense perspective,”

dalam *The Question of Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina*, 38 (Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory Committee Honorable House of Deputies of the Nation, 2011)

Garreta, Jaime. “Argentina: An Active Player in the Regional Cooperation

Process,” dalam A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribean, (2010) RESDAL : Red de Seguidady Defensa de América Latina

Godoy, Rupert. ”Defending Argentine Interests in the South Atlantic Area,” dalam

*The Questions of Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina*, 25 (Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory CommitteeHonorable House of Deputies of the Nation, 2011)

Hagan, J.D. “Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy.”

dalam L. Neack, et al. *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation*, (Prentice Hall, New Jersey, 1995).

Herz, Monica. “Does The Organization of American States Matter?,” Crisis States

 Working Papers Series No.2, (April, 2008) 16

Holsti, K.J. “Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar

 World”, Allen & Unwin, London, 1982

Kappen, Risse. “Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy,”

 (*Liberal Democracies World Politics*, Vol.43, No.4, Juli 1991)

Keohane, Robert O. “International Institutions Can Interdependence Work?,”

 Foreign Policy 110 (Spring, 1998),

Kigdon, J.W. “Agendas, Alternatives, and Public Policies, Little, Brown and

 Company.” (Boston, 1984)

Malek, A. dan Wiegand, K.E. “News Media and Foreign Policy: an integrated review,” dalam A.Malek. *News Media and Foreign Relations: a multifaceted perspective*, (Ablex Publishing Corporation, Norwood N.J, (Second edition, 1998)

Palermo, Vicente. “In Search of Common Good,” (Maret, 2011)

Putnam, R.D. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games.” International Organization Vol.42, No.3 (summer 1988)

Romero, Agustin M. “Bases to formulate an Argentine Foreign Policy for

 Malvinas,” dalam *The Question of Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina*, Agustin M. Romero, 120(Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory Committee Honorable House of Deputies of the Nation, 2011)

Sanford, Jonathan E. “International Organization as an Instrument of Foreign

Policy,” National Defense University Library (Washington, 1999)

Saraiva, Miriam Gomes. ” The Impact of the Resurging Malvinas (Falklands) Issue on South American and European Union Relations,” *International Security* (14 September, 2012) : 13

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : UNPAR PRESS, 2006)

Sileoni, Alberto. “Malvinas as an educational policy,” dalam *The Question of*

 *Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina*, 51 (Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory Committee Honorable House of Deputies of the Nation, 2011).

Spiller, Pablo T. dan Tommasi, Mariano. “Argentina : Political Institutions,

Policymaking Processes, and Policy Outcomes,” Stanford University Press

Taylor, Claire dan Miller, Vaughne. “The Falkland Island : Twenty Five Years

On,” Research Paper 07/29 International Affairs and Defence Section : House of Common Library (21 Maret, 2007)

Torres, Bermúdez dan Augusto, Cesar. “La doctrina respice polum ("Mirar hacia

el norte") en la práctica de las relaciones internacionales de Colombia durante el siglo XX,” (Universidad del Norte, Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, vol. 7, No. 12, 2010)

*The Daily Telegraph,* (11 February,2006)

\_\_\_\_\_.“Argentina,” A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribean, (2010) RESDAL : Red de Seguidady Defensa de América Latina.

**Dokumen**

“Joint Communiqué by the Presidents of the Rio Group concerning the Malvinas Islands,” Rio de Janeiro, (5 November, 2004) dalam Brazilian Foreign Policy Handbook (2008) Ministry of External Relations Bureau of Diplomatic Planning, 56-57

“Speech by President Luiz Inácio Lula da Silva at the Argentine Parliament during a ceremony to honor Brazil - Buenos Aires,” (16 October, 2003) dalam Brazilian Foreign Policy Handbook (2008) Ministry of External Relations Bureau of Diplomatic Planning

 “Speech by President Luiz Inácio Lula da Silva at the ceremony to mark the signing of acts and delivery of a press statement, during the celebration of 20 years of approximation between Brazil and Argentina, promoted by Presidents José Sarney and Raúl Alfonsí” Puerto Iguazú, (30 November, 2005) dalam Brazilian Foreign Policy Handbook (2008) Ministry of External Relations Bureau of Diplomatic Planning

Declaration on The Question of The Malvinas Islands (Declaration adopted at fourth plenary session, held on June 10, 2003)

Department of International Law : Secretariat for Legal Affairs Organization of American States, “Charter of The Organization of American States,”

Interview given by Minister Celso Amorim to *IstoÉ* magazine, issue No. 1936 (29 November, 2006) dalam Brazilian Foreign Policy Handbook (2008) Ministry of External Relations Bureau of Diplomatic Planning

Pidato Nestor Kirchner dalam “In Memorial of the War and Fallen Veterans in the Malvinas War” (2 April, 2006) doc.

United Nations : Report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for 2011 (New York, 2011)

**Situs** **Internet**

Briscoe, Ivan. “Néstor Kirchner's Argentina: a journey from hell,” (24 Mei, 2005) diakses 21 Desember 2012 (<http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/argentinapolitics_2538.jsp>)

Corum, James. “American neutrality on the Falklands is a symptom of US

foreign policy drift,” The Telegraph (26 Februari, 2010) diakses 5 Desember 2012 (<http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamescorum/100027451/american-neutrality-on-the-falklands-is-a-symptom-of-us-foreign-policy-drift/>)

Ethaleco, Hernan. “Brazil-Argentina, a sole voice to restructure a US$ 500 billion debt,” (17 Maret, 2004) diakses 12 Desember 2012 (<http://english.pravda.ru/world/americas/17-03-2004/5076-negotiations-0/>)

Hernandes, Vladimir. “Falkland tensions grow ahead of invasion anniversary

update,” (3 Februari, 2012) diakses 1 Oktober 2012 (<http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-latin-america-16858268>)

Hickman, Kennedy. “The Falklands War: An Overview,” diakses 6 Januari 2013 (<http://militaryhistory.about.com/od/battleswars1900s/p/falklands.htm>)

Larison, Daniel. “There Is Nothing New About U.S. Neutrality on the Falklands,” (19 April, 2012) diakses 5 Desember 2012 (<http://www.theamericanconservative.com/larison/there-is-nothing-new-about-u-s-neutrality-on-the-falklands/>)

McCann, David. “Column: The British government is facing separation anxiety,”

(7 Agustus, 2012) diakses 1 Oktober (<http://www.thejournal.ie/readme/column-the-british->government-is-facing-separation-anxiety-511315-Jul2012/)

Merke, Federico. “Argentina’s foreign policy in Kirchner’s second term,” (3

Maret, 2012) diakses 1 Oktober 2012 (<http://blogs.lse.ac.uk/ideas/2012/03/argentinas-foreign->policy-in-kirchners-second-term/)

Sapsted, David. “Old rivals in war of words over Falklands oil fields,” (21

Februari, 2010) diakses 1 Oktober 2012 (<http://www.thenational.ae/news/world/europe/old-rivals> -in-war-of-words-over-falklands-oil-fields)

Simpson, John. “Falkland Islands: How strong is Argentina's position?,” (2 April,

 2012) diakses 25 November 2012 (<http://www.bbc.co.uk/news/uk-17576856>)

UN Resolutions : Resolution of the Decolonisation Committee – 2004 diakses 1 Januari 2013 (<http://www.falklands.info/history/undecolinisation2003.html>)

United Nation Secretariat ST/CS/SER.A/42 : Nomenclature of the Falkland Islands (Malvinas) (3 Agustus, 1999) tersedia online dalam (<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.A/42>)

\_\_\_\_\_. “Americas Summit expected to release support-statement for Argentina’s

 Falklands claim,” *Merco Press South Atlantic News Agency*, (3 April, 2012) diakses 28 November 2012 (<http://en.mercopress.com/2012/04/03/americas-summit-expected-to-release-support-statement-for-argentina-s-falklands-claim>)

\_\_\_\_\_. “Argentina : Country Profile,” (28 Maret, 2012) diakses 8 Desember 2012

 ([http://www.fco.gov.uk/en/travel-and living abroad/travel-advice-by-country/country-profile/south-america/argentina/](http://www.fco.gov.uk/en/travel-and%20living%20abroad/travel-advice-by-country/country-profile/south-america/argentina/))

\_\_\_\_\_. “Argentina,” (12 Maret, 2012) diakses 13 November 2012

 (<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26516.htm>)

\_\_\_\_\_. “Argentina-Brazil Relations.” (2009) diakses 15 Desember 2012 (<http://www.mundoandino.com/Argentina/Argentina-Brazil-relations>)

\_\_\_\_\_. “Argentine-British Relations Thawing After Falkland War,” *Daily* *News,*

(15 Agustus, 1990) diakses 18 September 2012

(http://news.google.com/newspapers?nid=1696&dat=19900815&id=YPgaAAAAIBAJ&sjid=jkcEA AAAIBAJ&pg=7034,2473673)

\_\_\_\_\_. “Background to the Falkland Islands and the UN Decolonization

Committee,” diakses 1 Januari 2012 (<http://www.falklands.info/history/unbackground.html>)

\_\_\_\_\_. “Brazil reiterates support for Argentina, denies any blockade to the

Falklands,” *Merco Press. South Atlantic News Agency,* (1 Februari, 2012) diakses 5 Desember 2012 ([http://en.mercopress.com/2012/02/01/brazil-reiterates-support-for-argentina-denies-any-blockade-to-the-falklands#](http://en.mercopress.com/2012/02/01/brazil-reiterates-support-for-argentina-denies-any-blockade-to-the-falklands))

\_\_\_\_\_.“Brazil welcomes Kirchner as Argentina's next president,” *Mercopress* : *South* *Atlantic* *News* *Agency* (15 Mei, 2003) diakses 21 Desember 2012 (<http://en.mercopress.com/2003/05/15/brazil-welcomes-kirchner-as-argentina-s-next-president>)

\_\_\_\_\_. Charter of The Organization of American States (A-41) (2012) diakses 25 November 2012 (<http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm>)

\_\_\_\_\_. Embassy of Argentina in Australia “Malvinas Island,” diakses 3 Januari 2013 (<http://www.argentina.org.au/malvinas_islands.htm>)

\_\_\_\_\_\_. “First South American Energy Summit,” dalam “Secretaría de Relaciones Exteriores Argentina’s Position on Different Aspects of the Question of the Malvinas Islands,” (20 Desember, 2012) diakses 20 Desember 2012 (<http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/malvinas/homeing.html>)

\_\_\_\_\_. “General Assembly and Councils,” tersedia online dalam

(<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Eo1yl151790J:www.oas.org/SGInfAnual/2005/English/Cap%25201%2520(general%2520assembly).doc+&hl=en&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESjAA_C7O9v-UJ_LyKdn8oNt8ZWxDo9ZKUTIKabWbqdlsCP0Qd4x79fhCVFpY4_etOL2QNckhs3w3Rf7fDOroYKjBEAk9dtKLMh2-59k1fTv_P7a3RlS3pRj41zhi4aI3tOMBxVd&sig=AHIEtbQoiw8zUFW4YfL14XWBMkkDpfTXFQ)> diakses 30 Desember 2012

\_\_\_\_\_,“Hugo Chavez says Venezuelan troops would fight with Argentina over Falkland” diakses 31 Januari 2013 (<http://www.defence.pk/forums/world-affairs/157751-hugo-chavez-says-venezuelan-troops-would-fight-argentina-over-falkland-3.html>)

 \_\_\_\_\_. “Información sobre el Poder Legislativo,” Senado de la Nacion ` Argentina, diakses 8 Desember 2012

(<http://www.senado.gov.ar/web/informacion/legislativo/senado/tramite/cuerpo1.php>)

\_\_\_\_\_. “International Agreement Involving The Falkland Island,” diakses 18 September 2012 (http://www.falklands.info/history/agreements.html)

\_\_\_\_\_. “Kirchner mixes Malvinas homage with politics,” *MercoPress* *South Atlantic News Agency* (29 September, 2006) diakses 3 Januari 2013 (<http://en.mercopress.com/2006/09/29/kirchner-mixes-malvinas-homage-with-politics>)

\_\_\_\_\_. “Lula Wants UN to Recognize Argentina's Sovereignty over Malvinas/Falkland,” (Februari, 2010) diakses 19 Desember 2012 (<http://www.brazzilmag.com/component/content/article/82-february-2010/11909-lula-wants-un-to-recognize-argentinas-sovereignty-over-malvinasfalkland.html>)

\_\_\_\_\_. Member States (2012) diakses 25 November 2012 (<http://www.oas.org/en/about/member_states.asp>)

\_\_\_\_\_. “MERCOSUR,” dalam “Secretaría de Relaciones Exteriores Argentina’s Position on Different Aspects of the Question of the Malvinas Islands,” (20 Desember, 2012) diakses 20 Desember 2012 (<http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/malvinas/homeing.html>)

\_\_\_\_\_. “Mercosur Trade Center,” diakses 22 Desember 2012 (<http://www.mercosurtc.com/>)

\_\_\_\_\_. “Neighbors rally to support Argentina over Falklands,” CNN World (23 Februari, 2010) diakses 29 Desember 2012 (<http://articles.cnn.com/2010-02-23/world/falklands.argentina_1_falkland-islands-malvinas-islands-argentina?_s=PM:WORLD>)

\_\_\_\_\_. “OAS Backs Argentina Falkland Claims,” Home of Daily and Sunday Express (6 Juni, 2012) diakses 25 November 2012 (<http://www.express.co.uk/posts/view/324846/OAS-backs-Argentina-Falklands-claim>)

\_\_\_\_\_. “OAS meeting backs Argentina's claim to Falklands,” The Jakarta Post (6 Juni 2012) diakses 28 November 2012 (<http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/oas-meeting-backs-argentinas-claim-falklands.html>)

\_\_\_\_\_. “Overview the OAS : The Principal Forum for Inter-American Relations,” Foreign Affairs and International Trade Canada (31 Agustus, 2012) diakses 30 Desember 2012 (<http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/oas-oea/interamerican_affairs-affaires_interamericaines.aspx?lang=eng&view=d>)

\_\_\_\_\_. Press Release GA/COL/3105 (18 Juni, 2004) diakses 1 Januari 2013 (<http://www.un.org/News/Press/docs/2004/gacol3105.doc.htm>)

\_\_\_\_\_. “Sentinel Security Assessment-South America: Falkland Island,” (10 November, 2010) diakses 19 September 2012 (http://articles.janes.com/articles/Janes-Sentinel-Security-Assessment-South-America/Territories-Falkland-Islands.html)

\_\_\_\_\_. “Summit of The Americas,” Organization of American States, (2011) diakses 28 November 2012 (<http://www.summit-americas.org/default_en.htm>)

\_\_\_\_\_. “UK press reacts to Obama’s support for Argentina in the Malvinas Islands issue,” *MercoPress South Atlantic News Agency* (9 Juni, 2011) diakses 3 Januari 2012 (<http://en.mercopress.com/2011/06/09/uk-press-reacts-to-obama-s-support-for-argentina-in-the-malvinas-islands-issue>)

\_\_\_\_\_. “Who Are We?,” (2012) diakses 25 November 2012 (<http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp>)